



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOCYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor: 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2021 tanggal 10 Maret 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah.....	Rp	2.541.050.870.612,73
b.	Belanja Daerah.....	Rp	<u>2.532.169.209.185,59</u>
	Surplus.....	Rp	8.881.661.427,14
c.	Pembiayaan Daerah:		
1.	Penerimaan.....	Rp	398.584.982.878,78
2.	Pengeluaran.....	Rp	<u>26.920.832.137,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp	371.664.150.741,78
	Sisa lebih pembiayaan anggaran		
	tahun 2020.....	Rp	380.545.812.168,92

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.685.208.502,73 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp	2.538.365.662.110,00
2.	realisasi.....	Rp	<u>2.541.050.870.612,73</u>
	selisih lebih.....	Rp	2.685.208.502,73
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp375.923.103.666,19)dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran belanja setelah perubahan.....	Rp	2.908.092.312.851,78
2.	realisasi surplus.....	Rp	<u>2.532.169.209.185,59</u>
	selisih kurang.....	(Rp	375.923.103.666,19)
c.	selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp378.608.312.168,92 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran defisit setelah perubahan...	(Rp	369.726.650.741,78)
2.	realisasi surplus.....	Rp	<u>8.881.661.427,14</u>
	selisih lebih.....	Rp	378.608.312.168,92

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan..... Rp 398.584.982.878,78
 2. realisasi..... Rp 398.584.982.878,78
 - selisih..... Rp 0,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.937.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 28.858.332.137,00
setelah perubahan.....
 2. realisasi..... Rp 26.920.832.137,00
 - selisih..... (Rp 1.937.500.000,00)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.937.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto Rp 369.726.650.741,78
setelah perubahan.....
 2. realisasi..... Rp 371.664.150.741,78
 - selisih..... Rp 1.937.500.000,00
- g. realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp380.545.812.168,92.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset.....	Rp	5.059.678.892.687,95
b. jumlah kewajiban.....	Rp	5.071.641.479,08
c. jumlah ekuitas dana.....	Rp	5.059.678.892.687,95

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2020.....	Rp	398.587.107.878,78
b. arus kas dari aktivitas operasi.....	Rp	369.424.338.030,72
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan.....	(Rp	383.586.877.740,58)

d.	arus kas dari aktivitas pendanaan.....	(Rp	3.876.631.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris.....	(Rp	2.115.000,00)
f.	saldo akhir kas.....	Rp	380.545.822.168,92
g.	utang Pajak.....	Rp	0,00
h.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan....	Rp	0,00
i.	hutang kepada pihak ke-3.....	Rp	0,00
j.	saldo akhir kas lainnya.....	Rp	0,00
k.	saldo kas akhir per 31 Desember 2020.....	Rp	380.545.822.168,92

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan.....	Rp	2.579.380.954.168,03
b.	jumlah beban operasi dan transfer.....	Rp	<u>2.397.597.536.451,49</u>
c.	surplus dari kegiatan operasional.....	Rp	181.783.417.716,54
d.	defisit dari kegiatan non operasional.....	(Rp	4.821.363.468,00)
e.	jumlah pos luar biasa.....	(Rp	<u>3.955.380.940,00</u>)
f.	surplus -LO	Rp	173.128.581.122,83

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal.....	Rp	398.584.982.878,78
b.	penggunaan SAL.....	(Rp	398.584.982.878,78)
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran.....	Rp	380.545.812.168,92
d.	saldo anggaran lebih akhir.....	Rp	380.545.812.168,92

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal.....	Rp	4.881.855.292.334,48
b.	surplus- LO	Rp	173.128.581.122,83
c.	dampak komulatif perubahan kebijakan..	(Rp	<u>376.622.248,44</u>)

d. ekuitas akhir..... Rp 5.054.607.251.208,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2020;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV.1 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- p. Lampiran XV.2 : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi dana cadangan daerah;
- r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- s. Lampiran XVIII.1 : Daftar kewajiban jangka panjang;
- t. Lampiran XVIII.2 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- u. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih;
- b. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Mei 2021



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOCYAKARTA: (2,7 /2021)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	125,44	650.084.598.498,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	34.322.701.680,00	40.971.519.904,00	119,37	57.632.637.863,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	48.708.429.946,93	47.565.772.690,28	97,65	36.733.513.628,55
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	195.141.808.395,00	199.747.474.697,45	102,36	227.598.825.216,90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		676.743.940.021,93	788.246.742.427,73	116,48	972.049.575.206,45
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	51.870.453.000,00	59.203.528.046,00	114,14	33.344018.942,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	1.423.226.000,00	796.215.469,00	55,94	591.937.800,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	947.130.689.000,00	938.351.449.000,00	99,07	1.035.862.077.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	281.669.788.000,00	273.628.319.435,00	97,15	301.566.940.583,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.282.094.156.000,00	1.271.979.511.950,00	99,21	1.371.364.974.325,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.3	178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.c				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1	214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.c.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
28						
29	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.2.d				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	5.1.1.2.d.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2.d.2	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.d.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.d.4	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Bantuan Keuangan		49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
35	Total Pendapatan Transfer		1.724.599.497.143,57	1.617.144.005.540,00	93,77	1.788.227.110.597,00
36						

NO URUT	URATAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
37	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
38	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	137.022.224.944,50	135.660.122.645,00	99,01	80.359.600.000,00
39	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		137.022.224.944,50	135.660.122.645,00	99,01	80.359.600.000,00
42	JUMLAH PENDAPATAN		2.538.365.662.110,00	2.541.050.870.612,73	100,11	2.840.636.285.803,45
43						
44	BELANJA	5.1.2				
45	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
46	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.252.830.859.559,94	1.147.357.459.793,51	91,58	1.164.335.455.521,34
47	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	667.331.411.443,55	597.782.876.331,94	89,58	680.788.247.219,18
48	Bunga	5.1.2.1.c	140.675.922,00	89.787.135,00	63,83	815.138.250,00
49	Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hibah	5.1.2.1.e	158.734.301.928,50	153.744.141.147,56	96,86	110.760.813.362,34
51	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	64.839.000.000,00	53.395.042.950,00	82,35	29.342.042.220,00
52	Jumlah Belanja Operasi		2.143.876.248.853,99	1.952.369.307.358,01	91,07	1.986.041.696.572,86
53						
54	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	57.225.465.000,00	45.182.640.674,00	78,96	34.642.524.703,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	105.533.829.670,00	90.665.837.861,36	85,91	140.484.888.534,89
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	152.034.197.369,00	148.407.029.489,42	97,61	80.879.857.866,98
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	41.659.795.180,00	38.905.559.000,98	93,39	158.949.146.965,09
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	40.870.695.186,13	37.905.701.065,82	92,75	36.574.942.787,51
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Belanja Modal		397.323.982.405,13	361.066.768.091,58	90,87	451.531.360.857,47
62						
63	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
64	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
65	Jumlah Belanja Tak Terduga		57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
66	Jumlah Belanja		2.598.886.169.551,78	2.333.597.553.062,59	89,79	2.437.844.182.430,33
67						
68	TRANSFER	5.1.2.4				
69	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4.a				
70	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a.1	46.277.000.000,00	46.216.014.556,00	99,87	62.393.658.751,00
71	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.485.000.000,00	4.482.233.397,00	81,72	6.754.061.225,00
73	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		51.762.000.000,00	50.698.247.953,00	97,94	69.147.719.976,00
74						
75	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b				
76	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.620.000.000,00	105.140.870,00	6,49	792.971.390,00
77	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.267.300,00	58,26	267.521.493.614,00
78	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.180.000.000,00	0,00	0,00	1.689.001.912,49
79	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.444.143.300,00	147.873.408.170,00	57,44	270.003.466.916,49
80	Jumlah Transfer		309.206.143.300,00	198.571.656.123,00	64,22	339.151.186.892,49
81	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.908.092.312.851,78	2.532.169.209.185,59	87,07	2.776.995.369.322,82
82						
83	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(369.726.650.741,78)	8.881.661.427,14	2,40	63.640.916.480,63
84						
85	PEMBIAYAAN	5.1.3				
86						

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
87	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
88	Penggunaan SiLPA		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
89	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Jumlah Penerimaan		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
101						
102	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
103	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	92,24	61.078.500.000,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	100,00	7.020.000.000,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
113	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
115	Jumlah Pengeluaran		28.858.332.137,00	26.920.832.137,00	93,29	68.098.500.000,00
116	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	369.726.650.741,78	371.664.150.741,78	100,52	334.944.066.398,15
117						
118	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78



 Sleman,
 BUPATI SLEMAN,
Kustini Sri Purnomo
KUSTINI SRI PURNOMO

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2020**

No urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	676.743.940.021,93	788.246.742.427,73	111.502.802.405,80	116,48
1.1.1	Pajak Daerah	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	101.390.975.136,00	125,44
1.1.2	Retribusi Daerah	34.322.701.680,00	40.971.519.904,00	6.648.818.224,00	119,37
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	48.708.429.946,93	47.565.772.690,28	(1.142.657.256,65)	97,65
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	195.141.808.395,00	199.747.474.697,45	4.605.666.302,45	102,36
1.2	Dana Perimbangan	1.282.094.156.000,00	1.271.979.511.950,00	(10.114.644.050,00)	99,21
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.293.679.000,00	59.999.743.515,00	6.706.064.515,00	112,58
1.2.2	Dana Alokasi Umum	947.130.689.000,00	938.351.449.000,00	(8.779.240.000,00)	99,07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	281.669.788.000,00	273.628.319.435,00	(8.041.468.565,00)	97,15
1.2.4	Dana Desa Dari APBN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	579.527.566.088,07	480.824.616.235,00	(98.702.949.853,07)	82,97
1.3.1	Pendapatan Hibah	137.022.224.941,50	135.660.122.645,00	(1.362.102.299,50)	99,01
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	8.316.840.201,43	103,87
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	(105.030.876.000,00)	41,16
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	(626.811.755,00)	98,72
	Jumlah Pendapatan	2.538.365.662.110,00	2.541.050.870.612,73	2.685.208.502,73	100,11
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.563.816.877.413,10	1.312.733.724.175,51	(251.083.153.237,59)	83,94
2.1.1	Belanja Pegawai	1.005.494.488.692,94	918.406.370.293,51	(87.088.118.399,43)	91,34
2.1.2	Belanja Bunga	140.675.922,00	89.787.135,00	(50.888.787,00)	63,83
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	126.450.631.205,50	122.109.390.061,00	(4.341.241.144,50)	96,57
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	64.839.000.000,00	53.395.042.950,00	(11.443.957.050,00)	82,35
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	51.762.000.000,00	50.698.247.953,00	(1.063.752.047,00)	97,94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	257.444.143.300,00	147.873.408.170,00	(109.570.735.130,00)	57,44
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	(37.524.460.679,66)	34,95
2.2	Belanja Langsung	1.344.275.435.438,68	1.219.435.485.010,08	(124.839.950.428,60)	90,71
2.2.1	Belanja Pegawai	247.336.370.867,00	228.951.089.500,00	(18.385.281.367,00)	92,57
2.2.2	Belanja Barang Dan jasa	699.615.082.166,55	629.417.627.418,50	(70.197.454.748,05)	89,97

No urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	397.323.982.405,13	361.066.768.091,58	(36.257.214.313,55)	90,87
	Jumlah Belanja	2.908.092.312.851,78	2.532.169.209.185,59	(375.923.103.666,19)	87,07
	Surplus/(Defisit)	(369.726.650.741,78)	8.881.661.427,14	378.608.312.168,92	(2,40)
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	398.584.982.878,78	398.584.982.978,78	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	0,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	0,00	100,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	28.858.332.137,00	26.920.832.137,00	(1.937.500.000,00)	93,29
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	(1.937.500.000,00)	92,24
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.858.332.137,00	26.920.832.137,00	(1.937.500.000,00)	93,29
	Pembiayaan Netto	369.726.650.741,78	371.664.150.741,78	1.937.500.000,00	100,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	380.545.812.168,92	380.545.812.168,92	100,00

